



KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PROGRAM AMBULANS IBU HAMIL, BERSALIN, BENCANA ALAM, DAN GAWAT DARURAT DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

Afiya Sasti Ihtiarni

Kementerian Dalam Negeri

Corresponding Author: afiyasasti@gmail.com

ABSTRACT

Tawangmangu Subdistrict is an area that is vulnerable to emergencies and disasters. As an area with the potential for disaster events, the location of Tawangmangu District is far from hospitals and there are few referral vehicles. This has the potential to be one of the threats to public safety. In fact, the problems that occur due to emergency cases can be caused by several factors, one of which is access to health services and a substandard health care system. To overcome these obstacles, the government through the UPT Puskesmas Tawangmangu collaborated with various community organizations and volunteers from the local community to create an innovative program called the Ambulance for Pregnant Women, Maternity, Disaster, and Emergency or "Ambilin Badar". Ambilin Badar is a form of public health effort in improving ease of access in handling emergency situations. The purpose of this study is to analyze how the collaboration of the government, private sector, and community in the Ambilin Badar program which acts as a referral vehicle provider for the community. This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach referring to the theory of collaboration according to Emerson. Based on data analysis, the implementation of collaboration in the Ambilin Badar program is going quite well, it's just that there are slight shortcomings in the leadership aspects of stakeholders. The bottleneck to this program lies in the lack of funding. Based on the results of research in the field, it can be concluded that the collaboration process between stakeholders in the Ambilin Badar program has fulfilled the components of Ansel and Gash's collaboration, but in the element of collaboration leadership is still not in accordance with the theory.

Keywords: *Collaboration, Ambilin Badar, Stakeholder*

Copyright (c) 2023 Afiya Sasti Ihtiarni



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0
International License.

ABSTRAK

Kecamatan Tawangmangu merupakan wilayah yang rentan dengan kejadian gawat darurat dan bencana. Sebagai daerah dengan potensi kejadian bencana, letak Kecamatan Tawangmangu jauh dari rumah sakit dan minim kendaraan rujukan. Hal ini berpotensi menjadi salah satu ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Padahal kematian yang terjadi akibat kasus kegawatdaruratan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang masih dibawah standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui UPT Puskesmas Tawangmangu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan relawan dari masyarakat setempat membuat suatu program inovasi bernama Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana, dan Gawat Darurat atau “Ambilin Badar”. Ambilin Badar merupakan suatu bentuk usaha kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemudahan akses dalam penanganan situasi kegawatdaruratan. Maksud penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program Ambilin Badar yang berperan sebagai penyedia kendaraan rujukan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merujuk pada teori kolaborasi menurut Emerson. Berdasarkan analisis data, pelaksanaan kolaborasi pada program Ambilin Badar berjalan cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada aspek kepemimpinan para stakeholder. Hambatan pada program ini terletak pada masih kurangnya pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Ambilin Badar sudah memenuhi komponen kolaborasi Ansel dan Gash, namun dalam unsur kepemimpinan kolaborasi masih kurang sesuai dengan teori tersebut.

Kata kunci: Kolaborasi, Ambilin Badar, Stakeholder

PENDAHULUAN

Kasus kegawatdaruratan merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi, hal tersebut dibenarkan oleh Health Sector Review pada tahun 2017 yang menyebutkan peringkat tertinggi penyebab kematian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penyakit stroke, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit jantung. Kasus kegawatdaruratan tidak hanya terbatas pada tiga hal yang telah disebutkan sebelumnya, namun kasus seperti kematian ibu hamil, kematian bayi neonatus, dan korban bencana juga masih sering terjadi di Indonesia dan semuanya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Negara Indonesia dengan statusnya sebagai negara berkembang, penanganan kasus kegawatdaruratan menjadi tantangan dalam inovasi pada pelayanan publik Menurut National Emergency System (2011), yang dimaksud dengan kegawatdaruratan adalah suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini atau akan terjadi segera dan membutuhkan tindakan dengan koordinasi yang segera kepada orang atau properti yang memiliki tujuan untuk melindungi, keselamatan atau kesejahteraan orang, atau bertujuan untuk mengurangi kerusakan pada kepemilikan benda atau lingkungan sekitar. Dalam manajemen kegawatdaruratan koordinasi antar pihak adalah hal yang sangat penting, untuknya kerjasama dalam bentuk kolaborasi lintas sektor menjadi faktor yang penting bagi stakeholder untuk berintegrasi. Dalam hal ini, pembagian tugas dan tanggung jawab dengan menggunakan standar operasi prosedur serta keterlibatan masyarakat harus dilakukan agar public dapat mendapatkan informasi yang jelas (Hartono, 2020).

Kematian yang terjadi akibat kasus kegawatdaruratan memiliki banyak faktor salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang masih dibawah standar. Hal ini

menjadi tugas pemerintah untuk membuat sistem penanganan kegawatdaruratan sebagai upaya untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan kasus kegawatdaruratan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang terletak di lereng Gunung Lawu. Di samping kondisi wilayah Kecamatan Tawangmangu yang curam dan terjal sehingga menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas, ada beberapa bahaya lain yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang harus ditangani secara cepat yaitu seperti kasus ibu hamil beresiko tinggi dan komplikasi. Yang dimaksud dengan ibu hamil resiko tinggi menurut Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah keadaan pada ibu hamil yang sifatnya mengancam kehidupan sang ibu maupun janinnya, seperti umur, interval, paritas dan tinggi badan. Sedangkan yang dimaksud komplikasi pada proses persalinan adalah keadaan pada proses persalinan yang dapat mengancam ibu dan janin, seperti pendarahan, preeklamsia, letak melintang, partus lama, dan infeksi pada jalan lahir.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui UPT Puskesmas Tawangmangu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan relawan dari masyarakat setempat membuat suatu program inovasi bernama Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana, dan Gawat Darurat atau "Ambilin Badar". Ambilin Badar merupakan suatu bentuk usaha kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemudahan akses dalam penanganan situasi kegawatdaruratan. Inovasi ini digambarkan sebagai peningkatan peran jenjang ambulans milik swasta (organisasi masyarakat) dengan koordinator berada di Puskesmas Tawangmangu.

Ambilin Badar adalah suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah

dengan masyarakat yang memanfaatkan ambulans swadaya milik organisasi masyarakat di wilayah Kecamatan Tawangmangu yang berjumlah 2 milik Puskesmas dan 14 milik Yayasan dan Organisasi Masyarakat dengan tujuan untuk membantu transportasi di bidang kesehatan yang cepat, tepat bersinergi dan mempermudah koordinasi antara Puskesmas Tawangmangu, Ambulans Swadaya, fasilitas layanan kesehatan, relawan dan masyarakat pengguna layanan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program yang selanjutnya dikenal sebagai Ambilin Badar ini semakin berkembang dibuktikan dengan keanggotaannya yang terus bertambah dan prestasi yang didapatkan pada Lomba Inovasi Publik Kabupaten Karanganyar. Namun, dalam perjalanannya program ini memiliki beberapa permasalahan seperti fasilitas kesehatan yang berada pada kendaraan rujukan atau ambulans terutama yang berasal dari penyedia belum sepenuhnya memenuhi standar dikarenakan belum adanya sumber dana tetap yang berasal dari pemerintah. Untuk itu, diharapkan hal ini dapat menjadi perhatian lebih oleh pemerintah untuk segera diperbaiki.

KAJIAN TEORI

1. Kolaborasi

Secara etimologi, kolaborasi yang berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *collaborative* merupakan gabungan dari kata *co* dan *labor* yang memiliki makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Kata kolaborasi sering digunakan dalam penjelasan mengenai proses penyelesaian pekerjaan yang sifatnya lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, lintas organisasi dan bahkan lintas negara (O'Leary & Vij, 2012). Secara terminologi, kolaborasi memiliki makna yang luas dan umum dan dideskripsikan sebagai adanya situasi

adanya kerjasama antara dua atau lebih orang atau institusi yang memiliki pemahaman tentang situasi masing-masing secara bersama-sama dan berusaha memecahkan masalah bersama-sama juga. Secara spesifik, kolaborasi dapat dikatakan sebagai kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak secara bersama-sama.

Karena identik dengan ilmu-ilmu social pada umumnya, maka kolaborasi memiliki banyak pengertian dari berbagai ahli dan berbagai sudut pandang yang berbeda. Namun, banyaknya pengertian tentang kolaborasi tersebut didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu kebersamaan, kerjasama, pola pembagian tugas, kesetaraan, berbagi tanggung jawab, dan konsensus antar pihak yang berkolaborasi. Jadi, secara umum kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu atau organisasi yang saling berbagi, saling berpartisipasi, dan saling bersepakat untuk melakukan kerjasama dan berbagi informasi, sumber daya, manfaat, tanggung jawab dalam melaksanakan cita-cita untuk tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama (Saleh, 2020).

Menurut Abdulsyani dalam (Sara, 2020) kolaborasi adalah proses sosial di mana terdapat suatu kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan membantu dan memahami kegiatan orang lain. Kolaborasi adalah proses sosial yang sangat mendasar dan biasanya kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dan setiap orang melakukan pekerjaan masing-masing, yang merupakan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Jenkins dalam Alina Hartono (2020:34), pemerintah jarang mengatasi masalah hanya dengan menggunakan satu keputusan, kebijakan biasanya merupakan 'seperangkat keputusan yang saling terkait'. Hal

tersebut berarti merupakan suatu keharusan dalam kebijakan publik untuk menggunakan aspek kolaborasi dan sebagian besar kebijakan melibatkan serangkaian keputusan yang saling berkontribusi. misalnya, pada kebijakan kesehatan terdiri dari serangkaian keputusan tentang pembangunan fasilitas kesehatan, sertifikasi personel, pendanaan layanan kesehatan, dan hal-hal terkait lainnya (Tuohy dalam Hartono, 2020). Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008). Dari penjelasan tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa kolaborasi melibatkan banyak sektor dan banyak aktor dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

2. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang dinegosiasikan, formal, dan berorientasi konsensus bersama yang bertujuan untuk merumuskan atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola proyek atau aset publik. Dalam definisi tersebut ditekankan enam kriteria penting dalam proses kolaborasi yaitu forum yang dibentuk diprakarsai oleh badan atau lembaga publik, anggota forum termasuk lembaga non-pemerintah, peserta forum terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tidak hanya “dikonsultasikan” oleh lembaga public, pertemuan formal diselenggarakan secara berkala, forum bertujuan untuk mengambil keputusan secara mufakat (walaupun dalam praktiknya tidak tercapai mufakat), serta kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2008).

Emerson et., al (2012) memberikan definisi pada *collaborative governance* secara lebih luas yaitu sebagai

proses, struktur, dan manajemen pada pengambilan keputusan kebijakan publik di mana masyarakat ikut serta secara konstruktif melampaui batas dari agen publik, tingkatan pemerintah, privat, dan kewenangan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011), *collaborative governance* adalah kondisi di mana pemerintah dalam memenuhi tujuan public melakukan kolaborasi antar organisasi maupun individu. Perkembangan studi kebijakan menemukan terobosan tentang *collaborative governance* yang jauh dari kesan pendekatan normative. Hal itu tidak dipandang sebagai metode perumusan kebijakan yang berisi instrument namun sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan yang dicoba untuk didamaikan lewat jalan konsensus. Sebagai catatan di sini bahwa yang memiliki kuasa bukan hanya pembuat kebijakan, namun juga pihak-pihak yang terlibat di dalam implementasinya (Emerson et al., 2012).

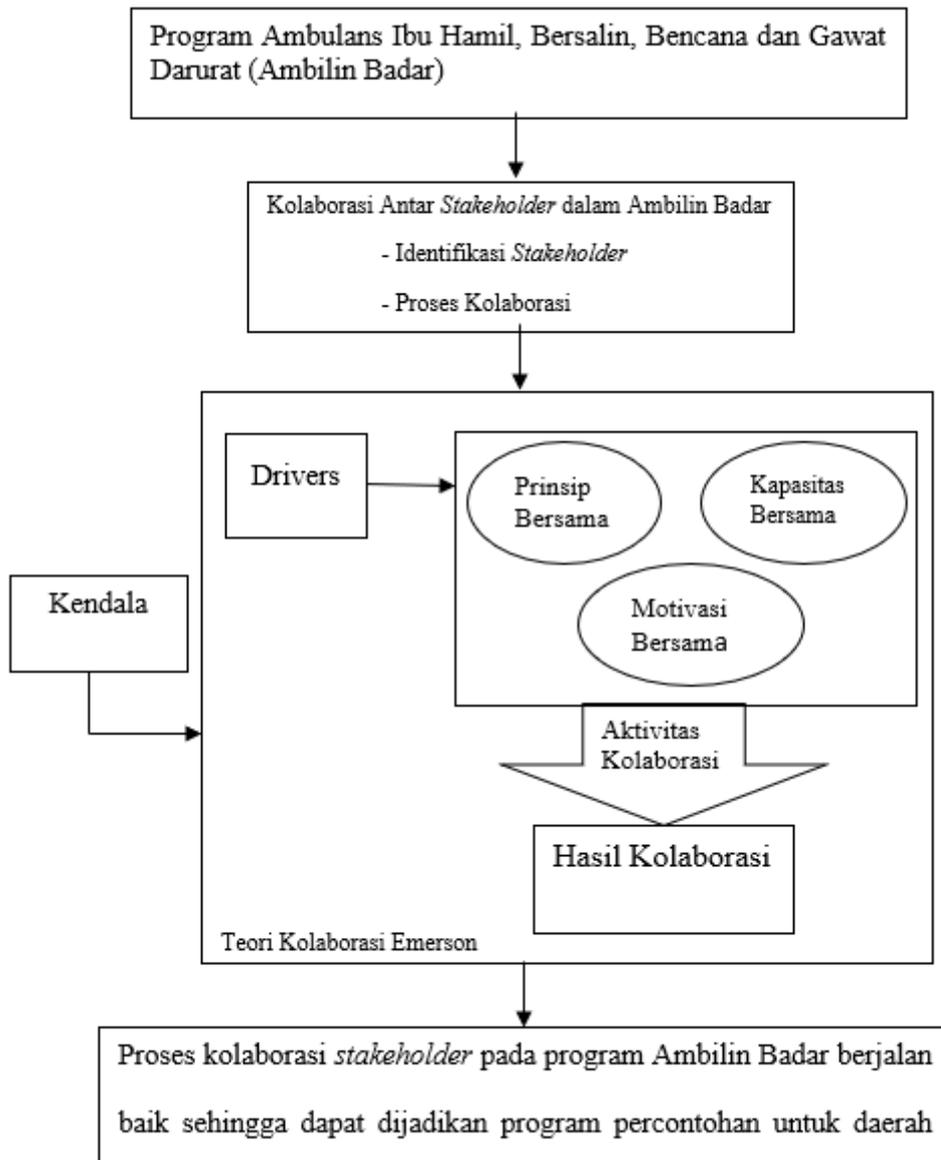
3. Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu

Pertolongan pada kasus gawat darurat merupakan suatu rangkaian penanganan yang saling terintegrasi yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kecepatan dalam penemuan penderita, kecepatan dalam meminta pertolongan, kesiapan dan kualitas pertolongan yang diberikan, penanganan selama perjalanan menuju rumah sakit dan pertolongan yang selanjutnya diberikan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit (Oman & McLain dalam Rini et al., 2019).

Menurut Depkes RI dalam Alina Hartanto (2020:62) sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu atau selanjutnya disingkat dengan SPGDT merupakan sebuah sistem untuk penanggulangan pasien gawat darurat terintegrasi yang memiliki unsur pelayanan di rumah sakit

dan antar rumah sakit. Pelayanan ini memiliki pedoman respon cepat dengan menekankan *time saving is life and limb saving*, serta di dalamnya melibatkan pelayanan masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans gawat darurat dan sistem komunikasi. Tujuan dari SPGDT adalah

sebagai peningkatan akses dan mutu dalam pelayanan keagawatdaruratan, sebagai percepatan respon penanganan penderita, menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif sebagai langkah untuk menjawab fokus penelitian dan menjawab rumusan masalah. Metode penelitian ini digunakan karena dapat menggambarkan secara jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diambil, serta dapat menjawab permasalahan dan menyimpulkan berdasarkan data yang telah diambil.

Pengumpulan data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan Sugiyono (2013). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan seperti UPT Puskesmas Kecamatan Tawangmangu, Forkopimca, Organisasi Masyarakat Penyedia Ambulans, dan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan analisis data.

Teknik yang dilakukan adalah dengan menghimpun data mengenai Ambilin Badar kemudian data yang telah terkumpul direduksi dan dipilih sesuai topik penelitian. Setelah itu, peneliti menyajikan data tersebut dan dilakukan dengan memaparkan data yang telah terseleksi untuk mengamati pola dan hubungan antar data. Kemudian peneliti menganalisis menggunakan teori kolaborasi menurut Emerson yang kemudian diolah lebih lanjut oleh peneliti dimana didapati 3 sub konsep yaitu pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kolaborasi dalam program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu adalah suatu program yang menarik untuk dianalisa. Para ahli kebijakan berpendapat bahwasanya jika kolaborasi multi-aktor dapat memacu inovasi publik, hal yang harus

diperhatikan adalah bagaimana merancang arena yang kondusif untuk pengembangan definisi masalah bersama, pembelajaran bersama dan kepemilikan bersama dari solusi yang baru (Ansell dan Gash, 2008). Program inovasi ini telah diadopsi oleh beberapa kecamatan lain di Kabupaten Karanganyar karena kolaborasi multi-aktor ini dinilai dapat mengatasi masalah kegawatdaruratan yang juga terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh pihak Puskesmas Tawangmangu bahwasanya program tersebut sudah diadopsi oleh kecamatan lain seperti contoh adalah Kecamatan Matesih. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin penting kesadaran bagi para pemimpin untuk membangun kolaborasi multi-lembaga melalui penerapan tata kelola kolaboratif, untuk kesiapsiagaan, perencanaan dan kegiatan mitigasi sebelum menanggapi insiden atau kondisi gawat darurat.

1. Analisis Peran Stakeholder dalam Program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu

Ambilin Badar merupakan inovasi baru yang memanfaatkan ambulans swadaya dalam membantu transportasi di bidang kesehatan yang cepat, tepat dan bersinergi. Inovasi Ambilin Badar turut mendukung keberhasilan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu, bayi baru lahir, balita dan neonatal, penyakit menular dan tidak menular, cedera dari kecelakaan lalu lintas dan bencana alam. Program inovasi ini selaras dengan tujuan SDGs pada pilar ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dengan menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Ambilin Badar sampai saat ini masih

berjalan dan semakin berkembang karena didukung dengan komitmen para stakeholder, sumber daya dan anggaran. Adapun pelaksana Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu diantaranya sebagai berikut:

1. UPT Puskesmas Tawangmangu dimana aktornya adalah Kepala UPT Puskesmas Tawangmangu dan Koordinator Program Ambilin Badar dengan tugas sebagai Pembina dan Penanggung Jawab Program Ambilin Badar yang menggagas ide atau inovator dan penggerak kolaborasi ambilin badar.
2. Forkopimca dimana aktornya adalah Camat Tawangmangu dengan tugas sebagai Pembina dan penyuluh yang melakukan pembinaan, pengarahan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Organisasi Penyedia Ambulans dimana aktornya adalah ECR, Ramah, Baitul Mal Aku Peduli, Al- Furqon, MLU Beji, Argomedjono dengan tugas sebagai Penyedia armada dan pelaksana teknis yang menyediakan armada berupa ambulans swadaya
4. Masyarakat , dimana aktornya adalah Relawan dengan tugas sebagai Pelaksana teknis yang mengemudikan ambulans dan melakukan evakuasi.

Selain masyarakat yang bersifat sukarela menjadi relawan dalam program Ambilin Badar, terdapat juga masyarakat yang selain berperan sebagai pengguna dan penerima manfaat dari adanya program ini namun juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program ini. Kontribusi masyarakat Kecamatan Tawangmangu dapat berupa sumbangan dana swadaya melalui G5S atau Gerakan Seminggu Seribu Saja Selamatkan Sesama yang disosialisasikan melalui Posyandu, perkumpulan Ibu-Ibu PKK dan lain-lainnya. Tak hanya kontribusi dalam

bidang pendanaan saja, masyarakat sebagai pengguna dan penerima manfaat dari program ini dapat memberikan kritik dan saran untuk selanjutnya dapat dibahas pada musyawarah rutin yang diadakan setiap empat bulan dan menjadikan program agar lebih baik ke depannya. Kontribusi masyarakat yang penting lagi dalam pelaksanaan program ini adalah melaporkan kejadian darurat, baik yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain agar diteruskan di dalam grup chat Ambilin Badar.

Berikut merupakan bagan yang menunjukkan proses kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder dalam program Ambilin Badar:



Sumber: Diolah oleh peneliti 2022

Gambar 2.
Proses Kolaborasi
Program Ambilin Badar

2. Analisis Kolaborasi Program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu

Dalam menganalisa proses kolaborasi pada program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu ini peneliti menggunakan model Collaborative Governanace yang dikemukakan oleh Emerson. Model Collaborative Governance tersebut digunakan karena dirasa tepat untuk membantu analisis dan merangkum proses kolaborasi yang menjadi sebuah inovasi sektor public yang

melibatkan multi aktor dan multi sektor. Collaborative Governance didefinisikan sebagai pengaturan yang mengatur proses pengambilan keputusan kolektif yang diambil secara formal dengan melibatkan pemangku kepentingan non-negara, yang orientasinya mengarah kepada konsensus dan musyawarah serta memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplemetasikan kebijakan publik atau pengelolaan program atau aset publik (Ansell and Gash, 2007).

Balogh (2012) juga mengemukakan definisi yang hampir sama mengenai Collaborative Governance yang diartikan

sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan public yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai level. Dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, untuk mencapai suatu tujuan public maka tidak bisa dilakukan apabila hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak saja, untuk itu kolaborasi ini sangatlah diperlukan. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan kategori stakeholder pada kolaborasi dalam program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu dilihat melalui perspektif *Collaborative Governance*.

Tabel 1.
Kategori Stakeholder dalam Program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu

	<i>Stakeholder</i>	The Role of Policy Actors
Government Sector	- Bupati Karanganyar - Camat Tawangmangu - UPT Puskesmas Kecamatan Tawangmangu	Formulation- Implemetation- Decission Making- Evaluation
	<i>Stakeholder</i>	The Role of Policy Actors
Private Sector	- Penyedia Ambulans Swadaya - Relawan	Formulation- Implementation
Society	Masyarakat Kecamatan Tawangmangu	Agenda Setting Evaluation

Sumber: Diolah oleh peneliti 2022

2.1 Penggerakan Prinsip Bersama

Konsep pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam penelitian ini merupakan seluruh sektor dan aktor yang terlibat dalam program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu. Dalam dunia pelayanan publik yang melibatkan beberapa sektor, seringkali terjadi tumpang tindih dalam pembagian kerja dan tanggung jawab. Beberapa inovasi atau suatu kebijakan yang baru tidak selalu mudah untuk diterapkan terlebih lagi inovasi yang melibatkan beberapa sektor atau disebut dengan lintas sektoral.

Hal tersebut juga terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya mengenai manajemen gawat darurat.

Proses kolaborasi pada program Ambilin Badar bersifat terbuka sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Proposal Inovasi Program Ambilin Badar bahwasanya keanggotaan dapat terus bertambah baik dari relawan maupun pihak penyedia armada ambulans, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dalam rangka untuk mendapatkan sinergi, memfasilitasi pembelajaran bersama, dan untuk

membangun komitmen agenda bersama. Sebagai sebuah inovasi sektor publik, Ambilin Badar memiliki tahapan kolaborasi yang dapat kita pahami melalui proses kolaborasi sebagai usaha untuk menyatukan orang-orang dan kelompok di berbagai lembaga, profesi, dan sektor. Proses kolaborasi dipahami juga sebagai sebuah siklus yang memberikan perhatian pada umpan balik dari awal kolaborasi dapat secara positif atau negatif memengaruhi kolaborasi lebih lanjut. Komunikasi adalah sebuah hal yang penting dan merupakan jantung dari kolaborasi. Komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dan hasil adalah hal yang esensial yang mempengaruhi pencapaian siklus yang baik pada kolaborasi (Vangen & Huxham, 2003)

Analisis terhadap data dan informasi yang didapati bahwa adanya suatu latar belakang dapat menjadikan adanya suatu pergerakan prinsip bersama dalam suatu proses kolaborasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya latar belakang terjadinya kasus ibu dan bayi yang meninggal dikarenakan faktor kurangnya akses terhadap kendaraan rujukan menjadikan pergerakan prinsip yang diprakarsai oleh pihak Puskesmas Kecamatan Tawangmangu dengan partisipasi dari pihak swadaya yaitu organisasi yang menyediakan ambulans dapat membentuk suatu program yang melibatkan proses kolaborasi di dalamnya.

Dengan adanya inovasi program yang menggunakan kolaborasi multi sektor ini, diharapkan terdapat manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingannya termasuk masyarakat itu sendiri. Setelah adanya program Ambilin Badar ini, koordinasi dalam penggunaan Ambulans untuk mengatasi situasi kegawatdaruratan diharapkan terjalin dengan baik. Manfaat yang dapat dirasakan setelah adanya program Ambilin Badar ini dapat dilihat langsung saat kejadian di lapangan, maka proses evakuasi berjalan lebih cepat

karena Ambulans yang telah siap akan langsung meluncur ke tempat terjadinya suatu kasus kegawatdaruratan. Tak hanya itu, keuntungan dari program Ambilin Badar ini membuat angka kematian ibu dan bayi akibat faktor kendaraan rujukan dipastikan tidak ada, apabila ada suatu kejadian tersebut maka hal itu bukanlah disebabkan oleh kendala pada bidang transportasi. Bentuk kolaborasi dapat digambarkan sebagai situasi dengan risiko yang tinggi namun memiliki keuntungan yang tinggi pula. Inovasi kolaboratif dinilai sangat cocok untuk diterapkan pada sektor public karena dapat membuka siklus inovasi untuk berbagai aktor dan memanfaatkan sumber daya inovasi yang bersifat lintas batas, serta dapat menciptakan dukungan politik yang luas untuk menjadi inovasi publik.

2.2 Motivasi Bersama

Dalam memulai suatu kolaborasi, salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan adalah motivasi partisipasi bersama. Lebih lanjut tentang motivasi bersama dijelaskan dalam teori kebutuhan menurut Abraham Maslow bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi, sehingga Maslow menganjurkan teori motivasi untuk mengarahkan perilaku manusia agar bisa diarahkan untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sifat dari partisipasi didefinisikan sebagai 'sukarela', namun dalam perkembangannya teori motivasi juga diperlukan dalam memahami insentif yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan dalam suatu tata kerja kolaboratif. Komitmen memiliki kaitan yang erat dengan motivasi asli untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan hasil temuan, masing-masing sektor yang berpartisipasi dalam kerja sama ini mungkin ingin terlibat untuk memastikan perspektif mereka tidak diabaikan. Komitmen terhadap suatu proses memiliki arti mengembangkan keyakinan bahwasanya perundingan dengan itikad yang baik dengan tujuan

untuk saling mendapatkan keuntungan adalah cara terbaik untuk mencapai hasil dari kebijakan yang diinginkan. Komitmen menjadi faktor yang penting dalam kolaborasi program Ambilin Badar ini, berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pada kondisi ini juga berarti mereka mengakui bahwa dalam program ini terdapat adanya saling ketergantungan pada masing-masing sektor dan semuanya memiliki fungsi dan peran yang saling mempengaruhi.

Lebih lanjut, bahwasanya dalam program kolaborasi ini masing-masing aktor telah memiliki kesepakatan dan mengetahui bagaimana tugas dan wewenangnya masing-masing dalam program ini. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara oleh informan di mana dari pihak Puskesmas Tawangmangu, pihak Pemerintah Kecamatan Tawangmangu, dan pihak Relawan Ambilin Badar telah mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang melakukan kolaborasi pada program ini dan mereka pun telah memiliki kesepakatan yang disetujui dengan melalui persetujuan MOU.

Kemudian berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil berikut:

1. Turunnya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) serta meningkatnya cakupan program P4K di Kecamatan Tawangmangu pada tahun 2018.
2. Turunnya angka kecacatan dan kematian akibat kasus kegawatdaruratan kesehatan.
3. Masyarakat merespon positif program inovasi Ambilin Badar dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna.
4. Koordinasi antar stakeholder semakin erat dengan adanya pertemuan dan bimbingan yang rutin dilaksanakan.

5. Memberikan pendidikan moral melalui Gerakan Seminggu Saja Selamatkan Sesama (GS5) untuk program Ambilin Badar.

2.3 Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama

Suatu kolaborasi pada hakikatnya dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan yang sulit dicapai apabila dilakukan oleh satu pihak saja. Pada proses kolaborasi, penting untuk bagaimana meningkatkan kapasitas masing-masing aktor yang terlibat untuk mewujudkan tujuan bersama dengan baik. Dalam manajemen interaksi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi maka dibutuhkan berbagai prosedur dan protokol.

Dari hasil temuan, dalam program Ambilin Badar terdapat suatu standar operasional prosedur yang diterapkan oleh pelaksana program. Standar operasional prosedur ini merupakan hal yang didapatkan oleh relawan melalui pembinaan dari pihak Puskesmas. Standar operasional juga ditetapkan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan dari program Ambilin Badar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku untuk pelayanan kegawatdaruratan. Mengingat armada ambulans swadaya dari masyarakat ini belum sepenuhnya berstandar seperti ambulans milik Rumah Sakit, namun dengan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang baik maka diharapkan pelayanan kegawatdaruratan dalam program Ambilin Badar dapat berjalan dengan baik dan layak.

Hal penting lainnya yang memegang peranan dalam proses kolaborasi adalah kepemimpinan. Dalam manajemen kegawatdaruratan, tahapan dari perencanaan, implementasi dan evaluasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemimpin dan hubungan antar pemimpin dalam suatu lingkungan lokal. Kemampuan dalam beradaptasi dan mendukung upaya kolaboratif dalam

situasi multi sektoral menjadi faktor utama penentu kesuksesan suatu program. Kepemimpinan sangat penting dalam mengarahkan kolaborasi menuju kesuksesan, tak hanya itu saja tetapi mereka juga mendapatkan manfaat dari cara pendekatan masalah tertentu ini.

Melihat dari Teori Sukarela (*compliance induction theorist*) yang dikemukakan oleh Moejiono (2002) bahwasanya leadership sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Dalam teori tersebut juga disebutkan bahwa kepemimpinan cenderung sebagai suatu pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Namun, dalam kolaborasi pada program Ambilin Badar ini, dijelaskan bahwa tidak ada yang menonjol dalam arti memimpin untuk pelaksanaan program ini.

Kemudian, kepemimpinan dalam kolaborasi program ini tidak terdapat kepemimpinan formal, seluruh pihak diartikan sama dan bekerja sama saling membutuhkan. Namun, masih terdapat pihak yang menjadi pembina dan melaksanakan monitoring serta pengawasan seperti pihak Puskesmas dan pihak Camat Tawangmangu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan dari informan yaitu pihak Puskesmas Kecamatan Tawangmangu selaku inovator namun tidak mau apabila dianggap sebagai pemimpin utama dalam kolaborasi ini karena pada dasarnya mereka juga pihak yang membutuhkan bantuan. Pernyataan dari pihak Pemerintah Kecamatan Tawangmangu dan Organisasi Penyedia Ambulans juga menyatakan bahwa pihak mereka bukanlah pemimpin atau ketua dalam program kolaborasi ini, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat kepemimpinan formal pada kolaborasi program Ambilin Badar.

Namun, masing-masing pihak menyadari bahwa inovator dalam program ini memiliki peran yang sangat penting bagi koordinasi dan pembinaan dalam kolaborasi pada program Ambilin Badar.

Lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program Ambilin Badar, maka hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin dan musyawarah yang rutin dilaksanakan setiap empat bulan sekali. Dalam musyawarah rutin tersebut dilakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan program Ambilin Badar dan apa saja kritik saran serta masukan dari berbagai pihak tentang pelaksanaan program ini. Musyawarah seperti ini dirasa tepat untuk dilakukan karena dalam program kolaborasi yang mengusung kerja sama oleh aktor multi sektor, pendekatan kekeluargaan dirasa lebih tepat dilakukan mengingat ini adalah program yang mengikutsertakan langsung masyarakat sebagai partisipan aktif dan penentu kelancaran program ini.

Kemudian hambatan pada program Ambilin Badar adalah pendanaan yang belum maksimal dan belum memiliki pendanaan yang tetap dari pemerintah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan dari informan yang menyatakan bahwa belum ada pendanaan khusus yang dialokasikan untuk program Ambilin Badar. Pendanaan hanya berupa dana yang jumlahnya tidak banyak dan sebenarnya pendanaan tersebut untuk Puskesmas Kecamatan Tawangmangu. sumber pendanaan yang lain yang bisa dilakukan adalah sumbangan sukarela dari masyarakat yang terus disosialisasikan yaitu “Gerakan Seminggu Seribu Saja Selamatkan Sesama” atau dapat disingkat dengan “GS5”.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Ambilin Badar sudah memenuhi komponen kolaborasi Ansel dan Gash, namun dalam unsur kepemimpinan kolaborasi masih kurang sesuai dengan teori tersebut. Proses kolaborasi dalam program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu memuat tiga unsur di dalamnya yaitu:

a) Penggerakan Prinsip Bersama

Pada komponen penggerakan prinsip bersama yang di dalamnya terdapat tujuan bersama dan pengambilan keputusan, seluruh stakeholder telah memiliki tujuan yang sama yakni peningkatan pelayanan kegawatdaruratan masyarakat di Kecamatan Tawangmangu. Tak hanya itu, pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah dengan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kolaborasi ini.

b) Motivasi Bersama

Dari unsur motivasi bersama yang di dalamnya terdiri atas kepercayaan, komitmen, legitimasi dan pemahaman bersama sudah terbentuk dengan baik. Kepercayaan antar pemangku kepentingan yang melaksanakan proses kolaborasi sudah terbentuk, dan pengakuan antar aktor sudah tercermin dengan baik. Hal tersebut membuat pemahaman bersama hadir sehingga komitmen antar stakeholder semakin kuat.

c) Kapasitas dalam Melakukan Tindakan Kolaborasi

Dari unsur kapasitas melakukan tindakan kolaborasi yang terdiri prosedur dan kesepakatan bersama, pengetahuan dan sumber daya sudah terpenuhi. Namun, pada unsur kepemimpinan dalam program ini belum menerapkan pemimpin formal atau leading sector karena dianggap semua pemangku kepentingan yang

berkolaborasi dalam program ini adalah sama dan bersifat saling membantu dan saling membutuhkan.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam proses kolaborasi pada program Ambilin Badar terletak pada pendanaan yang dinilai masih kurang dan belum memiliki pendanaan tetap tersendiri dari pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai kolaborasi stakeholder pada program Ambilin Badar di Kecamatan Tawangmangu maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Kesehatan yang telah mengetahui adanya program ini hendaknya memberikan dukungan lebih terutama pada sektor pendanaan karena program ini pada dasarnya membutuhkan dana yang banyak agar pelaksanaannya dapat lebih baik dan lebih berkembang lagi.
2. Pemerintah Kecamatan Tawangmangu akan lebih baik lagi apabila meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi terkait program ini kepada masyarakat sehingga G5S akan terlaksana dengan baik.
3. Untuk kedepannya, akan lebih baik apabila ditentukan salah satu pemangku kepentingan yang menjadi leading sector dalam program ini agar kepemimpinan dalam kolaborasi lebih jelas sehingga memudahkan dalam koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bungin, Burhan, (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,

- Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group
- Creswell, J. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Donahue, John D. & Richard J. Zeckhauser, 2011, Collaborative Governance: provate roles for public goals in turbulent times, New Jersey: Princenton University Press.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Pustaka Ilmu* (1st ed., Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*(A.L(ed.)).Grasindo.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rini, I., Suharsono, T., Ulya, I., & Suryanto. (2019). *Pertolongan Pertama Gawat Darurat* (1st ed.). Tim UB Press.
- Saleh, K. (2020). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi* (Vol. 1).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). CV Alfabeta.
- Wanna, John, 2008, Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?, Canberra: Australian National University E Press
- B. Jurnal dan Penelitian**
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). In *Kebijakan dan Manajemen Publik* (Vol. 3). <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- BPS, K. K. (2021). Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021*, 1–68.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hartono, A. S. (2020). *Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam PSC Kabupaten Tulungagung*
- Kapucu, N., & Garayev, V. (2013). Designing, Managing, and Sustaining Functionally Collaborative Emergency Management Networks. *American Review of Public Administration*, 43(3), 312–330. <https://doi.org/10.1177/027507401244719>

- O’Leary, R., & Vij, N. (2012). Collaborative Public Management. *The American Review of Public Administration*, 42(5), 507–522. <https://doi.org/10.1177/0275074012445780>
- Sara, R. (2020). *Pengaruh Kolaborasi Stakeholder dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Systematic Review)*. Universitas Airlangga.
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Enacting Leadership for Collaborative Advantage: Dilemmas of Ideology and Pragmatism in the Activities of Partnership Managers. *British Journal of Management*, 14(SPEC. ISS.). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2003.00393.x>

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak
- Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060/62 Tahun 2022 tentang Penetapan Inisiator Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

D. Sumber Lain

- <https://jatimtimes.com/baca/244782/20210703/121600/sepekan-2-kasus-kecelakaan-pengguna-jalan- raya-tawangmangu-sarangan-diimbau-tingkatkan-kewaspadaan>
- <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/23f99e3ecb889e401eda9ceb/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2021.html>
- <http://dinkes.karanganyarkab.go.id/?p=5283>
- <http://repository.unj.ac.id/1757/6/11.%20BAB%20II.pdf>